



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Februari 2025

Halaman: 5

LAPORAN KEUANGAN PEMKOT JOGJA

Serahkan LKPD, Berharap Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Senin (17/2). Diharapkan LKPD kali ini bisa kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penyerahan LKPD dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, kepada Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik. Penyerahan dilakukan bersama-sama dengan Pemda DIY dan empat kabupaten di DIY.

Sugeng Purwanto menjelaskan penyerahan LKPD merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. "Menjadi ritual setiap tahun yang menjadi kewajiban kami untuk menyerahkan. Tindak lanjutnya nanti BPK melaporkan ke Pusat," katanya.

Pemkot Jogja mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan LKPD sebanyak 15 kali berturut-turut. Ia berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. "Kami berharap WTP yang sudah baik selama ini, nanti untuk pelaksanaan kinerja 2024 juga tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga WTP juga masih bisa kami peroleh," katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik, menuturkan LKPD yang telah direviu oleh Inspektorat, disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Kami mengapresiasi Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah DIY yang menyampaikan LKPD sebelum jangka waktu tersebut," ujarnya.

Pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan

oleh BPK dengan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini bukan merupakan keputusan individu, melainkan hasil pemikiran kolektif tim pemeriksaan secara berjenjang.

"Selain memuat opini, pemeriksaan atas LKPD juga menghasilkan temuan yang signifikan dan material. Temuan tersebut dapat mengungkapkan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang material," katanya.

Temuan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang merupakan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan sistem atau proses dalam organisasi. "Sehingga dapat memberikan perbaikan pada tahun



Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto (kiri) menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik (kanan), di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Senin (17/2).

tahun mendatang," katanya.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerimanya. "Artinya,

dua bulan sejak hari ini kami akan menyerahkan LHP atas LKPD yang telah kami audit. Semoga semua lancar dan kami dapat menyampaikan LHP tepat pada waktunya," katanya. (Lugas Subarkah*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005